

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,
DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD KOTA DUMAI)**

Oleh:

Wendi Adha

Dra. Vince Rahmawati, M.Si.,Ak., BKP

Drs. Al Azhar. A, MM.,Ak

Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru - Indonesia

e-mail : Adhawendi@gmail.com

Abstract: *Transparency of financial reporting requires organizations to present the financial statements are free of material false and biased information to outside parties. This is consistent with the concept of the reliability of information in the financial statements which should be free of errors and misleading understanding of material, presenting any facts honestly, and can be verified. Transparency can be affected by the financial management accountability, leadership and commitment to environmental uncertainty. The research was carried out in the city with the object of research is Dumai departments, agencies, and offices in Dumai amounting to 33 Workers Local Government Unit. Samples taken in this study amounted to 99 respondents. The data was collected using a questionnaire which was then analyzed using linear regression. The test results showed that leadership accountability and commitment affect the application of the local government financial reporting transparency Dumai, whereas environmental uncertainty does not affect the application of the transparency of financial pelaporang. The magnitude of the effect of accountability, environmental uncertainty and leadership commitment to the implementation of the local government financial reporting transparency Dumai is 77%.*

Keywords: *Accountability, Environmental Uncertainty, Leadership Commitment and Application Transparency of Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan *good governance* adalah dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat itu sendiri (Aliyah, 2012). Menurut Sukhemi (2011), penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan

keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen – elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas. Dalam rangka menciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan

daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (*akuntable*).

Akuntabilitas, tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wujud dari akuntabilitas, pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No.24/2005).

Di dalam pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya kegiatan usaha, kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah telah mengarah ke *good governance*., salah satu cara yaitu dengan menciptakan transparansi nya laporan keuangan setiap SKPD kepada publik.

Komitmen pemimpin dalam organisasi atau pemerintahan menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Adanya komitmen, organisasi dapat berkembang searah dan seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi dapat mempengaruhi motivasi individu untuk menentukan suatu hal.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah (pemda) di wilayah Kota Dumai. Karena untuk mengetahui apakah penerapan transparansi pelaporan keuangan di wilayah Kota Dumai apakah sudah baik dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2012. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2011 lalu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai tahun anggaran 2011. Ketidakwaiban dalam penggunaan anggaran tersebut harus ditindaklanjuti Pemko Dumai. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Itu artinya, tak ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahun sebelumnya.

BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai belum tertib; (2) Pengelolaan persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai belum dilaksanakan dengan tertib; (3) Nilai aset tetap yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2012 belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) Penatausahaan investasi non permanen – dana bergulir tidak dikelola dengan memadai oleh LEK.

Permasalahan lain terkait Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain (1) Penerimaan daerah dari PT Askes digunakan langsung untuk belanja operasional pelayanan kesehatan; (2) Investasi dana bergulir yang dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Tujuh Negeri Dumai berpotensi tidak tertagih; dan (3) Pembayaran honorarium non PNS pada 10 SKPD melebihi standar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD kota Dumai).

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No.24 Tahun 2005).

Silver (2005) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Menurut Krina (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan.

Menurut Krina (2003) bentuk transparansi yaitu:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
- 4) Meningkatkan arus informasi.

Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1998) adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
- b) Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :

- a) Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah).
- b) Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang

berakibat meningkatnya resiko investasi.

- c) Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
- d) Kualitas keputusan menjadi buruk.
- e) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

Pemberian informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal.

Akuntabilitas

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo- Campo dan Tommasi 1999). Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2004)

Dimensi akuntabilitas publik meliputi , akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, pejabat dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas dapat meningkatkan resiko berinvestasi, dan juga mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama dalam pencapaian hasil pada

pelayanan publik. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil-hasil serta bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 58 Ayat (1) dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok, atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggungjawab.

Akuntabilitas Publik Keuangan Daerah

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. Hal ini dikarenakan secara definitif, kualitas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dan pemerintahan daerah yang bersih (*Clean Governance*) ditentukan oleh dua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supremasi hukum.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 dinyatakan bahwa selain berkewajiban melaksanakan beberapa hal seperti memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan pertanggungjawaban DPRD, masyarakat. Laporan pertanggungjawaban itu digunakan pemerintah pusat sebagai evaluasi pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 184 UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah harus meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, Catatan atas Laporan keuangan. Selain itu, untuk tujuan akuntabilitas seharusnya pemerintah daerah juga melaksanakan penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang dan memungkinkan untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah daerah dan penggunaan dana kepada publik.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan kepala daerah wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak tahun 2001 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) kepada DPRD, yaitu hasil pemeriksaan yang menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 23E ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK antara lain diserahkan kepada DPRD

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian Lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan. Ketidakpastian lingkungan

merupakan persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi (Priyono. P; SNA IV, 2001).

Duncan (1972) mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai (a) kesenjangan informasi yang menyangkut faktor-faktor lingkungan yang dihubungkan dengan situasi pengambilan keputusan, (b) tidak mengetahui *outcome* dari keputusan yang spesifik tentang seberapa banyak organisasi akan merugi jika keputusan tidak benar, dan (c) ketidakpastian untuk menaksir probabilitas dalam berbagai tingkat kepercayaan yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan unit dalam melakukan fungsinya. Gregson *et al* (1994) menyatakan bahwa ketidakpastian sebagai rasa ketidakmampuan individu dalam memprediksi sesuatu secara tepat. Ketidakpastian akan berdampak pada akurasi perencanaan yang disusun, karena pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, informasi merupakan komoditi yang sangat berguna dalam proses kegiatan perencanaan dan kontrol suatu organisasi.

Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu.

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan

keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab, dengan demikian, ukuran komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah pimpinan SKPD adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2001) menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, sasarannya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia.. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah melalui transparansi pelaporan keuangan. Dengan

demikian harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang good governance bisa tercapai.

Penelitian yang dilakukan Suparno (2011) menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, masih belum mampu berpengaruh signifikan pada peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Dumai. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Liper Siregar (2011) Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yg penting terhadap transparansi kepada publik, sehingga jika suatu pemerintah daerah berani dan mampu menerapkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin nya juga semakin tinggi dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawabannya pemerintah daerah mampu menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas nya kepada publik dan masyarakat juga bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ketidaksiapan instansi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi atau instansi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pmpinani akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999).

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan instansi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 24/2005, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No.35). Oleh karena itu, transparansi akan mendorong instansi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (*reliability*).

Penelitian yang dilakukan M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Andi Kartika (2010) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh positif dalam senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan seorang karyawan yang mempunyai partisipasi tinggi dalam anggaran mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu memprediksi masa mendatang. Demikian hal nya penelitian yang dilakukan oleh Diana Rahmawati (2007) Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan akan menguatkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai power yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain.

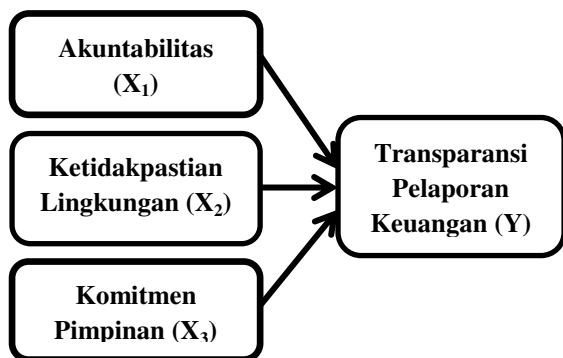
Kedudukan yang vital dan strategis itu tentu saja membawa konsekuensi. Ketika suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka itu merupakan keberhasilan pemimpin. Tapi

sebaliknya, jika suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, maka itu juga merupakan bentuk kegagalan pemimpin. Jadi, komitmen pimpinan sangat menentukan implementasi kebijakan.

Penelitian yang dilakukan Sumarno (2004) menemukan bahwa Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta. Berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) menemukan bahwa komitmen manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi akan berpengaruh terhadap bawahannya, hal ini ditunjukkan dalam pelaporan keuangan, SKPD tidak hanya melaporkan informasi yang hanya bersifat positif saja bagi SKPD berupa capaian, akan tetapi juga berupa ketidaktercapaian. Adanya peraturan dan perundang-undangan hanya sebagai pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Peraturan dapat dikatakan hanya sebagai pendorong penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Model Penelitian

Dari Latar Belakang dan penjelasan teori diatas , maka model penelitian dalam penelitian ini dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Model Penelitian

Hipotesis

Atas dasar kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut

- H1 : Terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- H2 : Terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- H3 : Terdapat pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas, badan, dan kantor pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Dumai yang berlokasi di wilayah Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2013 hingga Maret 2014.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto & Suparno, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah (pemda) di wilayah Pemerintah Kota Dumai. Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indrianto & Suparno, 2000). Pemilihan sampel didasarkan pada metoda pengambilan sampel tidak acak atau *nonrandom sampling* yaitu *purposive*

sampling dengan jenis *judgment sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah pejabat eselon 3 pada SKPD pemerintah daerah Kota Dumai yang berjumlah 33 SKPD. Dari kriteria pejabat eselon 2 dan 3 pada setiap SKPD akan diambil 3 responden yaitu Kadis SKPD, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Program yang sudah menjabat minimal selama 1 (satu) tahun. Pejabat eselon 2 dan 3 yang telah menjabat selama 1 (satu) tahun atau lebih di SKPD, dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam SKPD serta terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 99 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Data primer berupa jawaban langsung dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada pegawai pejabat eselon 2 dan 3 (Kadis SKPD, kasubag keuangan dan kasubag program) yang bekerja minimal 1 tahun pada SKPD (Dinas, Badan dan Kantor) di Kota Dumai.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kemudian data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pencarian di internet dan instansi terkait serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur variabel yang akan diukur. Uji validitas dilakukan dengan melihat r_{tabel} . Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n). Nilai r_{tabel} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r_{hitung} untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan instrumen yang dapat dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dapat diandalkan pula. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan koefisien *cronbach alpha* untuk mengestimasi validitas setiap skala (indikator observarian). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alpa lebih dari 0,60.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat *uji statistik normal probability plot* (normal P-P Plot) terhadap masing-masing variabel. *Normal probability plot* dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (*observed normal*) dan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika sebaran data berada disekitar garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan software SPSS ver 17.0 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas dapat dilihat secara umum ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dan

dari *Varian Inflation Factor* (VIF) dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen < 5 . Jika $VIF > 5$ maka variabel tersebut mengalami gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika $VIF < 5$ maka variabel tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan

Pengujian Hipotesis

Persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

Y	=	Transparansi Keuangan	Pelaporan
a	=	Konstanta	
b ₁ , b ₂ , b ₃	=	Koefisien regresi	
X ₁	=	Akuntabilitas	
X ₂	=	Ketidakpastian Lingkungan	
X ₃	=	Komitmen Pimpinan	
e	=	Standar Error	

1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan dua arah (*two tails*), dengan tingkat keyakinan 90% dan dilakukan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 10% dan *degree of freedom* (df) = n-k. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji Koefesien Determinasi (R²)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, kemudian nilai tersebut dikalikan 100%. Rumus : Determinasi = $R^2 \times 100 \%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 99 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 93 kuesioner (93,94%), dan sebanyak 6 kuesioner (6,06%) tidak mendapat respon. Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 1 dan gambaran umum dari responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	F	%
kuesioner dikirimkan	99	100
kuesioner kembali	93	93,94
kuesioner tidak kembali	6	6,06
kuesioner dapat diolah	93	93,94

Sumber: Data Olahan (2014)

Tabel 2. Demografi Responden

Keterangan	F	%
Umur Responden :		
a. 20 - 30 tahun	12	12,91
b. 31 - 40 tahun	36	38,70
c. 41 - 50 tahun	35	37,64
d. 51 - 60 tahun	10	10,75
Total	93	100
Pendidikan Terakhir :		
a. Diploma	18	19,36
b. S1	50	53,76
c. S2	25	26,88
Total	93	100
Posisi Jabatan :		
a. Kasubag Program	30	32,25

Keterangan	F	%
b. Kasubag Keuangan	42	45,16
c. Kepala Dinas	21	22,59
Total	93	100
Lama Menjabat:		
a. 1 – 5 tahun	66	70,96
b. 5 – 10 tahun	26	27,96
c. 11 – 15 tahun	1	1,37
Total	93	100
Masa Kerja:		
a. 1 – 10 tahun	14	15,05
b. 11 – 20 tahun	28	30,11
c. 21 – 30 tahun	32	34,41
d. > 30 tahun	19	20,43
Total	93	100
Jenis Kelamin :		
a. Laki-laki (Lk)	66	60,22
b. Perempuan (Pr)	27	39,78
Total	93	100

Sumber: Data Olahan (2014)

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 93, maka di dapat r_{tabel} sebesar 0,202. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaa valid dan sebaliknya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

No	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
1	Akt. 1	0,648	0,202	Valid
2	Akt. 2	0,816	0,202	Valid
3	Akt. 3	0,830	0,202	Valid
4	Akt. 4	0,699	0,202	Valid
5	Akt. 5	0,751	0,202	Valid
6	Akt. 6	0,659	0,202	Valid
7	Akt. 7	0,770	0,202	Valid
8	Akt. 8	0,746	0,202	Valid
9	Akt. 9	0,745	0,202	Valid
10	KL 1	0,798	0,202	Valid
11	KL 2	0,850	0,202	Valid
12	KL 3	0,843	0,202	Valid
13	KL 4	0,829	0,202	Valid
14	KP 1	0,677	0,202	Valid
15	KP 2	0,746	0,202	Valid
16	KP 3	0,870	0,202	Valid
17	KP 4	0,747	0,202	Valid

No	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
18	KP 5	0,702	0,202	Valid
19	TPK 1	0,729	0,202	Valid
20	TPK 2	0,645	0,202	Valid
21	TPK 3	0,826	0,202	Valid
22	TPK 4	0,858	0,202	Valid
23	TPK 5	0,789	0,202	Valid

Sumber: Data Olahan (2014)

2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Batasan untuk uji reliabilitas adalah 0,6. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

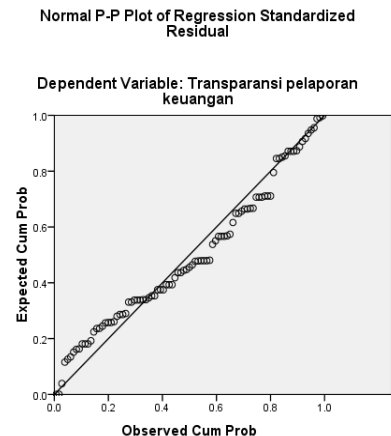
Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Ket.
Akuntabilitas	0,897	Reliabel
Ketidakpastian Lingkungan	0,840	Reliabel
Komitmen Manajemen	0,800	Reliabel
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,827	Reliabel

Sumber: Data Olahan (2014)

Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normslitas Data

Untuk melihat normalitas data dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis lurus), maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data adalah terpenuhi dan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas data. Dan berdasarkan gambar 2 berikut diketahui bahwa data memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Normal Probability Plot

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Jika nilai *VIF* > 10 atau nilai *Tolerance* < 0,10 berarti terdapat multikolinearita

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tol.</i>	<i>VIF</i>	Ket.
Akuntabilitas	0.376	2.656	Bebas Multikolinetas
Ketidakpastian Lingkungan	0.340	2.944	Bebas Multikolinetas
Komitmen Pimpinan	0.272	3.680	Bebas Multikolinetas

Sumber: Data Olahan (2014)

3. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

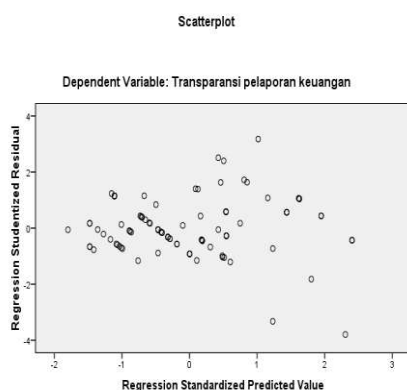
Tabel 6. Nilai Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson	dL	dU	Ket.
1	1,673	-2	+2	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data Olahan (2014)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola pencar (*scatter plot*). Jika diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dan berdasarkan gambar 2 berikut di ketahui bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.



Gambar 2. Scatterplot

Hasil Pengujian Model Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda terhadap model penelitian yang diajukan dilakukan dengan bantuan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 17.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstand. Coefficients		Stand. Coefficients	t	Sig.
	B	SE	Beta		
1 (Constant)	1.524	1.065		1.431	.156
Akuntabilitas	.132	.049	.221	2.707	.008
Ketidakpastian lingkungan	.036	.090	.034	.394	.695
Komitmen pimpinan	.724	.096	.727	7.577	.000

a. Dependent Variable: Transparansi pelaporan keuangan

Sumber : Data olahan (2014)

Berdasarkan Tabel 7 diatas, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :

$$Y = 1,524 + 0,132 X_1 + 0,036 X_2 + 0,724 X_3$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Pengujian Hipotesis Satu (Akuntabilitas)

Akuntabilitas diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai . Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 7 diperoleh koefisien akuntabilitas sebesar 0,132 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara akuntabilitas dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Kemudian diperoleh nilai t_{tabel} sebesar dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($93-3-1=89$) sebesar 1,987. Dengan demikian diketahui $t_{\text{hitung}} (2,707) > t_{\text{tabel}} (1,987)$ dan $p \text{ value } (0,008) < \alpha (0,05)$. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Hasil Pengujian Hipotesis Dua Ketidakpastian Lingkungan)

Ketidakpastian Lingkungan diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 7 diperoleh koefisien ketidakpastian lingkungan sebesar 0,036 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara ketidakpastian lingkungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Diketahui t_{tabel} dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($93-3-1=89$) sebesar 1,987. Dengan demikian diketahui $t_{\text{hitung}} (0,394) < t_{\text{tabel}} (1,987)$ dan $p \text{ value } (0,695) > \alpha (0,05)$. Kesimpulannya H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Hasil Pengujian Hipotesis Tiga (Komitmen Pimpinan)

Komitmen Pimpinan diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 7 diperoleh koefisien komitmen pimpinan sebesar 0,724 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara komitmen pimpinan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Diketahui t_{tabel} dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($93-3-1=89$) sebesar 1,987. Dan diketahui t_{hitung} (7.557) > t_{tabel} (1,987) dan $p \text{ value}$ (0,000) < α (0.05) Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil pengujian diatas memberikan kesimpulan yaitu komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R^2 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependennya. Untuk regresi dengan variabel independen lebih dari 2, digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinansi. Untuk melihat besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel berikut :

Tabel 8. Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.777	.770	1.22209

Sumber: Data Olahan (2014)

Hasil perhitungan analisis regresi pada Tabel 8 diperoleh *adjusted R²* sebesar 0,770 Dengan demikian variabel akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan dan komitmen pimpinan hanya dapat menjelaskan variabel transparansi pelaporan keuangan sebesar 77%. Sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil Pengujian validitas dan reliabilitas untuk seluruh variabel telah memberikan hasil yang baik. Pengujian terhadap setiap pertanyaan menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki tingkat validitas dan reabilitas yang sesuai.
2. Hasil pengujian normalitas data terhadap seluruh variabel menunjukkan bahwa distribusi jawaban responden adalah normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik *normal probability plot*, yaitu data tersebar disekitar garis diagonal.
3. Hasil pengujian hipotesis yang merupakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. Pengujian hipotesis Ketidakpastian Lingkungan menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada SKPD dalam satu daerah. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digenalisir kesemua objek mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Jumlah sampel masih terbatas, akan memberikan hasil yang lebih baik lagi jika sampel yang digunakan lebih banyak.
3. Peneliti tidak mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner karena keterbatasan waktu. Sehingga responden tidak bisa menanyakan langsung terhadap pertanyaan yang tidak dimengerti.
4. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan pada kuisisioner. Hal ini dapat menyebabkan masalah subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
5. Penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor-faktor maupun indikator lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan dalam konteks isomorfisme. Penelitian selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan faktor maupun indikator yang lain, misalnya faktor politik, jumlah anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan sebagainya

Saran

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di kota/kabupaten lainnya bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuisisioner. Misalnya mencari waktu

yang tepat bagi responden untuk mengisi kuisisioner, memberikan pemahaman kepada responden yang kurang mengerti terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan, serta diharapkan peneliti juga dapat menyebarkan kuisisioner secara langsung pada setiap SKPD. Sehingga, tingkat pengembalian kuisisioner lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.

3. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan dalam mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda).
5. Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai pada khususnya. Berhasilnya atau berpengaruhnya semua hipotesis yang disusun bisa menjadi rujukan dan masukan bagi SKPD kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.

- Duncan, R. B., (2004), Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, *Administrative Science Quarterly*, pp. 313-327.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Kartika, Andi. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran*. Kajian Akuntansi, Februari 2010, Hal: 39 - 60 Vol. 2 No. 1
- Krina. 2008. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Web: <http://www.goodgovernance.com>
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 2007. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012
- Rahmawati, Diana. 2007. *Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Partisipasi Penganggaran Dan kinerja Manajerial*.
- Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*.
- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar*.
- Sukhemi, 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi Keuangan Daerah (di Provinsi D.I.Yogyakarta)*, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 8, 2011 : 84-95
- Sumarno, J. 2005. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Solo, VIII 2005.
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Studi Kajian Pada Pemerintahan Kota Dumai
- Undang- Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Pasal 58 Ayat 1.